PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA DAN PELAKSANAANNYA

Fransiska Novita Eleanora
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

ABSTRACT

The children are our continuous future generation, therefore their growth have to be maintained, not only to protect them from the force or violent but also to avoid them from the discrimination so that they obtain the suitable condition for their life. The purpose of this paper is to explain more detail the protection of children's right in order to obtain their suitable life as a human method. The method used normally and empirical law research. The result show that even the government or the society, pay no attention optimally to the child protection.

PENDAHULUAN

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak saat ini, suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan, lahir, bathin maupun sosial. Adanya Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 44/23 Tahun 1989, secara umum telah diterima atau diadopsi oleh hampir semua bangsa di dunia. Pemerintah Indonesia kemudian mengamandemen Konvensi Hak Anak kedalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menafsirkan pasal-pasal tersebut kepada masyarakat untuk melakukan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai suatu badan negara independen.

Dilandasi kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini, maka pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tingkat optimum potensi yang dimilikinya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang melindungi harus menjadi issue yang penting dari semua kalangan. Perhatian, komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi

nyata terhadap penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak-hak anak, situasi yang secara umum menunjukkan bahwa akumulasi energi masyarakat dan negara yang dikerahkan masih belum cukup efektif untuk menciptakan dukungan kehidupan dan lingkungan ramah anak, yang dapat menjamin optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan semua anak sebagai generasi penerus bangsa.

Implementasi UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sepertinya perlu mendapat perhatian lebih dari semua elemen bangsa ini. Selain telah isu internasional, persoalan anak kini semakin sensitif seiring dengan canggihnya pola dan modus operandi kejahatan terhadap anak. Secara fakta bahwa kekerasan terhadap anak semakin mudah dijumpai di sekitar kita. Lingkungan keluarga maupun sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak untuk bertumbuh kembang, kini mulai berubah menjadi lahan subur aksi kekerasan terhadap anak. Singkatnya, anak kini makin sering menjadi obyek penderita kejahatan dan kekerasan.

Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah "Apakah Pelaksanaan perlindungan Anak di Indonesia sudah sesuai dengan harapan dan kenyataan" ?

PEMBAHASAN

Perlindungan Sebagai Konsep Domain

Perlindungan dapat diartikan sebagai usaha-usaha

ampertahankan, menjamin atau menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat membawa kerugian terhadap sesuatu. Dalam perbandingan hukum konstitusi hak-hak ekonomi dan sosial masih dianggap baru untuk dimasukan sebagai hak-hak hukum dalam suatu konstitusi negara. Apalagi kita sudah meratifikasi Kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob),. artinya secara konstitusional Indonesia harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu secara tegas. Di sisi lain Kovenan EKOSOB ini merupakan perisai yang dipola untuk melindungi kemerdekaan individu dari aplikasi kekuasaan negara yang eksekutif di satu pihak, dan mengekang kekuasaan negara di pihak lain. Hal ini merupakan *adalah model perimbangan kekuatan, dalam artian* kendala negatif terhadap kekuasaan negara. Pencantuman hak-hak ekonomi dan sosial dalam undang-undang perlindungan anak berarti menentang teori liberal hak-hak konstitusi. Perlindungan kemerdekaan individu dan pemenuhan kebutuhan sosial merupakan nilai-nilai dasar yang penting dalam suatu konstitusi yang mengintegrasikan hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 tersebut secara jelas memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Kemudian Bab XA hak asasi manusia, Pasal 28A-28J mencerminkan hal tersebut. Sementara hak anak secara tegas ditetapkan dalam pasal 28B: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ini adalah hak perlindungan yang harus dijamin oleh negara dalam proses bernegara.

Hak-hak Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Hak-hak perlindungan yang dimaktubkan dalam pasal 28B (2) UUD 1945 yang telah diamandemen: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Karena itu dibutuhkan suatu tindakan hukum tambahan untuk mengimplementasikannya, dan juga tunduk pada kemauan politik serta dukungan publik.

Kalau disimak pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka secara nyata pasal tersebut menyentuh isu

yang berada di luar batas peraturan. Yang berarti hal itu sama dengan memasuki suatu ladang ranjau moral dan penilaian sosial, suatu bidang yang tidak jelas definisi, konsep ideologi yang berbeda-beda. Jika kita ingin menjamin suatu standar kehidupan anak yang memadai, maka isu-isu di luar peraturan harus dihadapi. Masalah atau kegagalan implementasi hak anak di Kepri *menunjukkan keadaan kelangsungan hidup anak atau standar kehidupan anak.* Hampir semua ukuran-ukuran mengenai perkembangan awal anak berhubungan dengan pencapaian-pencapaian dan perilaku-perilaku masalah dalam kehidupan anak.

Kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan *pondokan, tetapi suatu standar hidup yang memadai* menuntut lebih dari itu. Berapa besar secara kuantitatif dibutuhkan tidak dapat dinyatakan dalam artian umum, tetapi akan tergantung pada kondisi kultur masyarakat yang bersangkutan.

Secara sederhana harus dinyatakan bahwa yang terpenting adalah kualitas anak dalam waktu yang nyata. Sehingga ketersediaan sarana/prasarana pendidikan yang berkualitas dan aksesnya merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Sebagaimana juga untuk layanan kesehatan; bahwa banyak ditemukan anak berusia di bawah 18 tahun yang dieksploitasi sebagai pekerja seksual komersil; bahwa ditemukan anak yang berkonflik dengan hukum dan "diproses" secara hukum sebagaimana pelaku tindak kriminal lainnya; banyak anak terlantar yang mencari hidup di jalan; banyak anak usia 10-18 tahun bekerja di sektor informal di pertokoan ataupun perumahan; banyak anak dari kelompok masyarakat yang meninggalkan bangku sekolah dasar sebelum tamat atau tak melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena masalah akses dan ekonomi; banyak panti asuhan sangat minim fasilitasnya; sangat sedikit sekolah untuk anak cacat; bahwa banyak kasus adopsi dilakukan di luar prosedur standar administrasi kependudukan; suara anak belum dipertimbangkan dalam berbagai proses perencanaan pembangunan wilayah.

Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia

Mengenai masalah perlindungan anak mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002, yang khusus mengatur

mengenai perlindungan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang ini karena negara Indonesia menjamin Kesejahteraan warganya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa.

Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi ekonomi, ataupun diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya, sehingga hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, secara optimal mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena banyak faktor yang menyebabkan anak berisiko mengalami kekerasan pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, seperti :

1. Cara pengasuhan menggunakan kekerasan yang diterapkan lintas generasi

Pengasuhan demikian biasanya masih menggunakan pendekatan militer atau otoriter. Jenis pengasuhan ini memberi pengalaman kepada anak tentang kekerasan. Sehingga anak cenderung tidak hormat kepada orang tuanya.

2. Kemiskinan yang berdampak urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan perubahan harapan terhadap kualitas hidup

Kemiskinan jelas telah menghambat kesempatan dan cita-cita anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya. Pemerintah yang tidak sanggup memberikan pekerjaan pada orang tua sehingga berdampak pada anak, akibatnya si anak tidak dapat bersekolah karena tidak ada biaya dan harus membantu orangtuanya.

3. Nilai-nilai masyarakat yang Eksploitatif dan Diskriminatif

Orang tua yang menganggap anak adalah hak miliknya sehingga hak-haknya harus diabaikan, disisi lain anak

selalu dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan anak masih dipandang sebagai kelompok yang tidak pernah dianggap secara sosial, kultur atau secara legal akibatnya, anak menjadi rentan terhadap segala macam kekerasan yang pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia

4. Sistem Hukum yang tidak mendukung perlindungan anak.

Meski Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Karena bukan hanya peraturan perundangan saja yang dipermasalahkan tetapi pihak aparat penegak hukum yang masih belum berspektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan itu. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga rendah dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum yaitu **substansi** harus dibenahi, **aparat hukum** harus ditingkatkan pengetahuan, pemahaman, dan **keberpihakannya** pada hak-hak anak dan budaya hukum masyarakatnya harus dibangun agar memiliki wawasan yang lebih mengutamakan kepentingan anak.

Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak, harus mencantumkan tentang Hak asasi anak merupakan pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun.

Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, mneyeluruh, dan komprehensif maka undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan **asas-asas** :

1. Asas Nondiskriminasi

Asas yang tidak membedakan, membatasi, mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, ras, suku, status sosial, ekonomi, budaya, jenis kelamin yang dapat mempengaruhi perlindungan anak.

2. Asas kepentingan yang terbaik bagi Anak

Asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan

yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif, yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. masyarakat dan orang tua.

3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai dan bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua.

4. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak

Asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sedangkan Konvensi Hak Anak (KHA) 20 November 1989, berfungsi membantu dan memantau situasi perkembangan hak anak. Pasal 42 menentukan bahwa negara peserta akan melakukan daya upaya agar prinsip-prinsip diketahui KHA secara luas. Selanjutnya, ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi :

a. Hak terhadap Kelangsungan hidup

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

b. Hak terhadap Perlindungan

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak yang terlantar.

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral; dan sosial anak.

d. Hak untuk Berpartisipasi

Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Dengan berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, maka dalam pelaksanaannya belum memenuhi harapan dimana kekerasan terhadap anak, eksploitasi, perdagangan anak masih saja terjadi. Meskipun sejumlah lembaga perlindungan anak telah dibentuk untuk menekan angka kekerasan anak, namun kinerja mereka belum memuaskan.

Situasi dan kondisi anak Indonesia sangat jauh dari apa yang diharapkan, kepedulian pemerintah terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 sejak lahirnya Undang-Undang Kesejahteraan Anak, tetapi secara nyata pemenuhan akan hak anak akan kesejahteraan sangat jauh dari yang diharapkan.

Hal-hal yang menggambarkan situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini:

1. Di Bidang Pendidikan

Banyaknya anak yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya atau putus sekolah, hal ini diakibatkan tidak dapat membaca dan menulis. Untuk mengatasi anak putus sekolah pemerintah mencanangkan program wajib belajar untuk anak berusia 7-12 tahun.

2. Di Bidang Kesehatan

Pada sektor kesehatan dan masih adanya tanggungan biaya pengobatan yang tinggi, membuat anak-anak miskin lebih baik memilih menahan rasa sakit ditempat tinggalnya daripada harus berobat.

3. Pekerja Anak

Berdasarkan data Sensus Kesejahteraan Nasional (Susenas), di Indonesia terdapat 1.502.600 anak berusia 10-14 tahun yang bekerja dan tidak bersekolah serta membantu dirumah dikarenakan tidak adanya biaya.

4. Anak Tanpa Akta Kelahiran

Hal penting lainnya yang diabaikan pemerintah, yakni pembuatan akte kelahiran gratis yang sampai saat ini sulit didapatkan oleh keluarga miskin, dimana akte kelahiran ini berfungsi sebagai identitas dan status hukum anak tersebut.

5. Anak Korban kekerasan dan Mengalami Perlakuan Salah

Menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, bahwa kekerasan dan perlakuan salah mendapatkan tempat yang tinggi, hal ini tidak hanya terjadi dimuka

WAWASAN

umum, tetapi juga di rumah bahkan di sekolah.

6. Anak yang mengalami kekerasan, anak yang diperdagangkan

Trafficking (perdagangan anak), dilakukan karena kemiskinan dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, sehingga orang tua pun rela menjual anaknya demi pemenuhan kebutuhan hidup.

7. Anak Jalanan

Kehadiran anak jalanan dipandang secara negatif oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai "anak nakal", dalam konteks melakukan penanganan pada anak jalanan, maka stigma tersebut perlu diubah, artinya mereka harus dipandang sebagai korban yang harus ditolong dan dipenuhi hak-haknya.

8. Anak Penyandang cacat

Menurut Statistik Sekolah Luar Biasa, jumlah peserta didik penyandang cacat mencapai 87.801 anak (27,35%), dengan demikian masih banyak anak cacat yang tinggal di desa, kecamatan dan kabupaten/kotamadya yang belum mengenyam pendidikan, hal ini merupakan upaya pemerataan pendidikan dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

9. Anak butuh orang tua pengganti (Adopsi)

Dengan adanya pengangkatan anak, maka diharapkan kesejahteraan anak dan perlindungannya dapat terpenuhi, tetapi secara nyata, banyak dijumpai adopsi yang salah, dimana anak tersebut dijual atau diperdagangkan ke orang lain.

10. Anak yang berkonflik dengan hukum

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, dan mereka ditempatkan ditempat penahanan/penjara seperti layaknya orang dewasa.

Aparat penegak hukum di Indonesia selama ini belum memiliki respon yang tinggi terhadap perlindungan anak. Mereka tidak menempatkan masalah perlindungan anak sebagai prioritas utama, karena tidak ada unsur politisnya. Ada beberapa departemen yang menangani masalah anak, namun belum dapat bersinergi dan koordinasi dalam menangani masalah anak karena berfungsi hanya sebatas kebijakan, bukan dalam pengawasan.

KPAI juga didesain sebagai lembaga tempat

pengaduan dan analisis kasus perihal perlindungan anak. Di samping itu, KPAI juga berhak memberikan saran kepada kepala negara perihal isu seputar anak. Namun, tugas perlindungan anak Indonesia tidak serta merta dibebankan sepenuhnya kepada lembaga independen seperti KPAI saja. Penegak hukum masih saja tidak mau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lebih memilih Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dikarenakan belum ada peraturan pelaksanaannya.

Salah satu alasan mengapa undang-undang perlindungan anak harus dilaksanakan karena undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 60 juta tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan percabulan terhadap anak yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasca ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak dan disahkannya UU tentang Perlindungan Anak, berdirilah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebuah lembaga independen di bawah naungan pemerintah yang bertugas meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Indonesia. agar sistem perlindungan anak di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia belum sepenuhnya memberikan harapan dalam pelaksanaannya karena seorang anak belum mendapatkan perhatian yang serius mengenai kelangusungan hidupnya, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak dan menghargai pandangan/pendapat dari seorang anak.
2. Dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak memberikan pedoman bagi pemerintah dan penegak hukum dan masyarakat, untuk lebih memberikan dan memperlakukan anak-anak Indonesia secara adil dan manusiawi.

Saran

1. Agar perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan dengan baik, harus ada rasa tanggung jawab dan kepedulian antara pemerintah, penegak hukum, dan

masyarakat, terhadap hak-hak anak Indonesia.
2. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, sebaiknya penegak hukum berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bukan berdasarkan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

DAFTAR PUSTAKA

Amad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008

Lies Sugondo, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Nasional yang Berspektif HAM*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Jakarta, 2009

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Selamat “Hari Anak Nasional” Jayalah Anak Indonesia

Majalah Ilmiah
WIDYA
MENGEMBANGKAN KREATIFITAS & MENINGKATKAN KUALITAS
TERBIT SEJAK 1984